



FORD
FOUNDATION



HASIL SURVEI & INDEKS
PERHUTANAN SOSIAL

KELOLA HUTAN UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN

DESEMBER 2020

PENGANTAR

“Dulu lahan ini banyak diberikan kepada yang gede-gede. Sekarang, kita berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan. Ini untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas.”

■ Itulah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 2017 tatkala menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Pemberian SK merupakan tindak lanjut pemerintah mewujudkan komitmen pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Agenda pengelolaan hutan oleh masyarakat, sebenarnya telah bergulir sejak 1995 hingga akhirnya terwujud lewat Permen LHK No 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani.

Program Perhutanan Sosial terdiri dari lima skema: Hutan Desa; Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; Hutan Kemitraan; dan Hutan Adat. Booklet ini merangkum implementasi kelima skema tersebut, serta dampaknya bagi tujuan program ini, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk mengetahui sejauh mana dampak tersebut, Katadata Insight Center (KIC) mengukurnya melalui survei terhadap 103 kelompok usaha Perhutanan Sosial. Dari hasil survei ini diketahui dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, kelestarian lingkungan, serta bagi penyelesaian konflik tenurial. Temuan hasil survei KIC ini juga dilengkapi dengan hasil riset dari sejumlah lembaga lainnya.

Sejak diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo pada 2015, pemerintah menargetkan 12,7 juta hektar hutan bisa



dikelola oleh masyarakat hingga akhir 2019, lalu diperpanjang hingga akhir 2024. Sejauh ini, hingga September 2020, sudah tercapai 4,2 juta ha. Untuk mendukung percepatan program ini, KIC merumuskan Indeks Perhutanan Sosial yang mengukur kontribusi dan peran pemerintah provinsi dalam percepatan pelaksanaan program ini. Berdasarkan Indeks dihasilkan lima provinsi sebagai percontohan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

“Rakyat sejahtera dan hutan lestari. Artinya, kita harus menjaga alam lingkungan karena kita meminjam dari generasi mendatang. Jadi, alam yang kita wariskan paling tidak seperti sekarang, bahkan lebih baik,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dalam dialog nasional Indonesia Maju di Tasikmalaya, pada 13 Oktober 2018.

Atas terbitnya booklet ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, khususnya kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ford Foundation, serta sejumlah lembaga nirlaba seperti Kemitraan, Madani Berkelanjutan dan lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dalam bentuk data, dokumen, informasi, masukan dan dukungan lainnya.

Jakarta, Desember 2020
TIM PENYUSUN



KELOLA HUTAN UNTUK WARISAN GENERASI MENDATANG

Survei Katadata Insight Center (KIC) pada September 2020 dan sejumlah riset lainnya menunjukkan bahwa program Perhutanan Sosial terbukti berdampak bagi pemerataan akses ekonomi, menjaga kualitas hutan, dan melegalisasi penggunaan lahan bagi masyarakat. Hasil survei memperlihatkan bahwa pendapatan responden (petani) naik hingga dua kali lipat, tutupan hutan bertambah luas, serta konflik tenurial bisa terselesaikan. Ini memberikan harapan pengelolaan hutan menjadi lestari sehingga berkontribusi untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, serta berguna bagi generasi mendatang.

TEROBOSAN PENGELOLAAN HUTAN UNTUK RAKYAT

Presiden Joko Widodo menjamin kepastian hak dan akses akan tanah melalui **Perhutanan Sosial**. Program ini diharapkan bermanfaat juga mampu menyelesaikan persoalan penguasaan lahan (tenurial) lewat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Solusi Ragam Perkara

Penyelesaian konflik tenurial

- Legalisasi dan redistribusi lahan.
- Pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat.

Ekonomi

- Menyerap tenaga kerja.
- Meningkatkan pendapatan melalui usaha hasil hutan.
- Mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumber daya hutan.

Lingkungan

- Mengurangi kebakaran hutan.
- Meningkatkan luas tutupan lahan.
- Mengembalikan kualitas lingkungan hutan dengan partisipasi masyarakat.

Lima Skema Perhutanan Sosial



Empat Pilar Perhutanan Sosial



Legalitas akses atas kawasan hutan (*legality*).



Pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial (*on farm*).



Pengelolaan hasil hutan dan peningkatan nilai ekonomi (*off farm*).

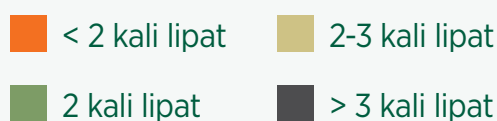


Akses pemasaran hasil hutan (*access to market*).

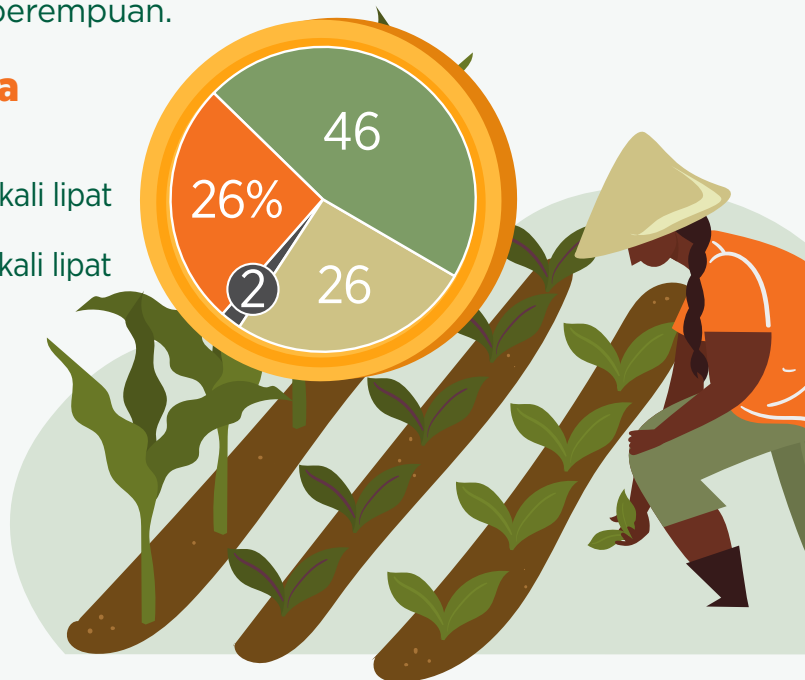
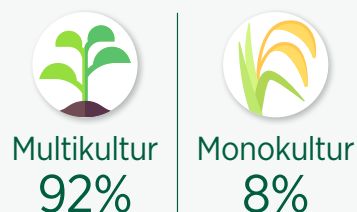
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, MELESTARIKAN HUTAN

Survei Katadata Insight Center (KIC) pada 2020 terhadap 103 kelompok usaha, menyebut program Perhutanan Sosial membantu memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari segi ekonomi, lingkungan, juga pengurangan konflik. Hanya saja, perlu adanya dorongan keterlibatan perempuan.

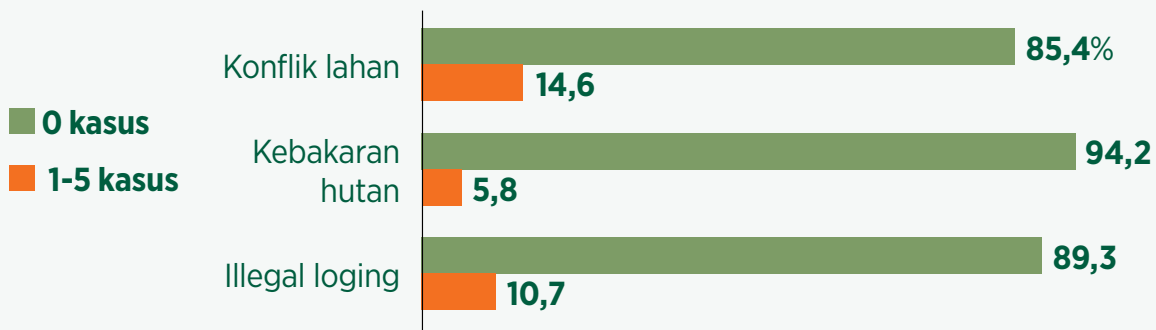
Pendapatan Anggota Meningkat



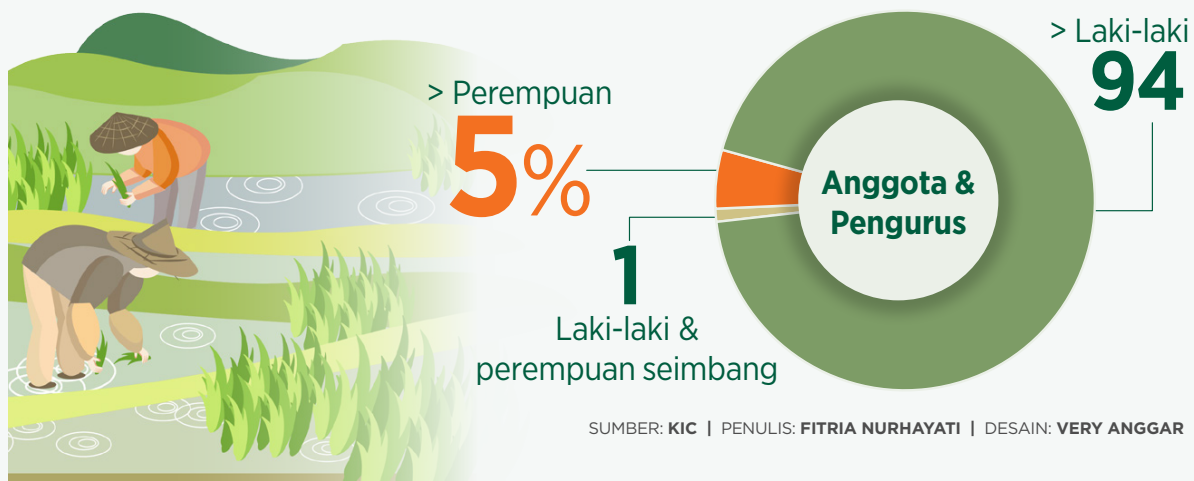
Jenis Tanaman Beranekaragam



Hampir Tak Ada Konflik



Keterlibatan Perempuan Masih Minim





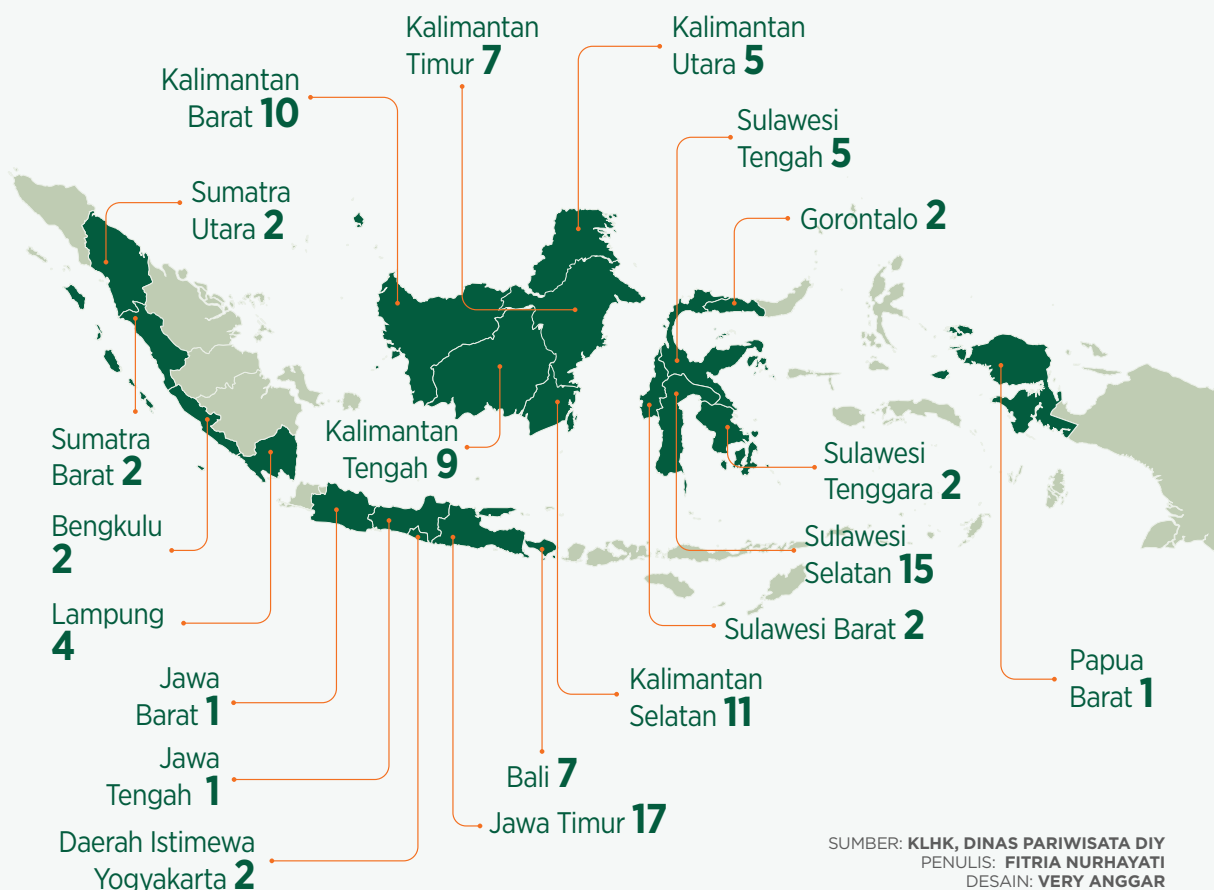
MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI BAGI PETANI

Program Perhutanan Sosial terbukti memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Melalui program terpadu yang melibatkan para stakeholder di sekitar hutan, mencakup petani, pendamping, pemerintah hingga BUMN dan korporasi swasta, masyarakat di sekitar hutan mampu meningkatkan kapasitasnya sehingga menjadi lebih produktif dan sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

MEMBUKA LAPANGAN KERJA DARI HUTAN WISATA

Sejumlah cara bisa dilakukan dalam mengelola Perhutanan Sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi **tujuan wisata**. Hasilnya, membuka **lapangan kerja**, menarik **wisatawan**, dan meraih **pendapatan** hingga **Rp 7 miliar**.

Sebaran Hutan Kemasyarakatan untuk Lokasi Wisata



SUMBER: KLHK, DINAS PARIWISATA DIY
PENULIS: FITRIA NURHAYATI
DESAIN: VERY ANGGAR

Contoh Manfaat Hutan untuk Tujuan Wisata (2018)

Lokasi	Jumlah pekerja (orang)	Jumlah wisatawan (orang)	Pendapatan tiket masuk (Rp)
HKm Mandiri Desa wisata Kalibiru Kulonprogo, DIY	116	90 di area wisata, 16 kelompok penyewaan mobil dan kuliner	Naik 18 kali lipat dibanding 2013
HKm Tani Manunggal Wisata Goa Rancong Kencono dan air terjun Sri Ghetuk, Gunungkidul, DIY	90 di area wisata, 16 kelompok penyewaan mobil dan kuliner	Naik 17 kali lipat dibanding 2013	3,6-7,2 miliar

Manfaat Bermitra Bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial



Mendapatkan akses modal



Mendapatkan pendampingan



Mendapatkan pelatihan manajemen usaha



Mendapatkan akses pasar

MENAIKKAN PENDAPATAN LEWAT AGROFORESTRI

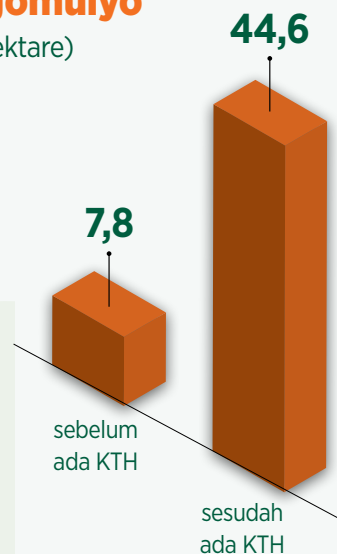
Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) terhadap 103 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menunjukkan bahwa 98,4 persen responden mengaku pendapatannya meningkat. Salah satu yang paling merasakan manfaat ekonomi adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Margomulyo di Desa Burno, Lumajang, Jawa Timur.

6 Kali Lipat

kenaikan pendapatan Kelompok Tani Hutan Margomulyo, setelah mengikuti program Perhutanan Sosial yang menerapkan sistem agroforestri.



Kenaikan Pendapatan KTH Margomulyo (juta rupiah/hektare)



Skema Agroforestri Di Margomulyo

Pola pengembangan pertanian terpadu yang mencakup budidaya hasil hutan dari hulu ke hilir.



Pola tanam agroforestri

- Agrosilvikultur
- Agrosilvopastur
- Pertanian kehutanan



Pengolahan hasil pertanian

- Kerajinan
- Industri produk olahan



Teknologi angkut tradisional



Biogas

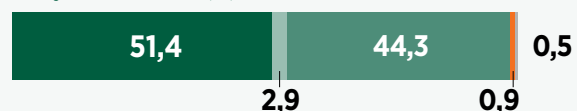


Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

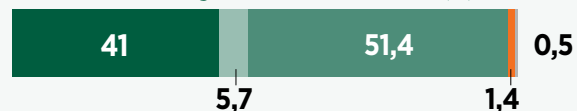
Dukung Ekonomi Kerakyatan

Survei KIC menunjukkan Perhutanan Sosial memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

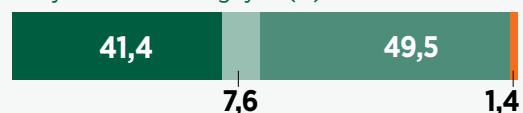
Turut membuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat sekitar (%)



Perekonomian warga sekitar ikut membaik (%)



Masyarakat semakin guyub (%)



■ Sangat setuju ■ Setuju ■ Agak setuju
■ Tidak setuju ■ Sangat tidak setuju ■ Tidak ada

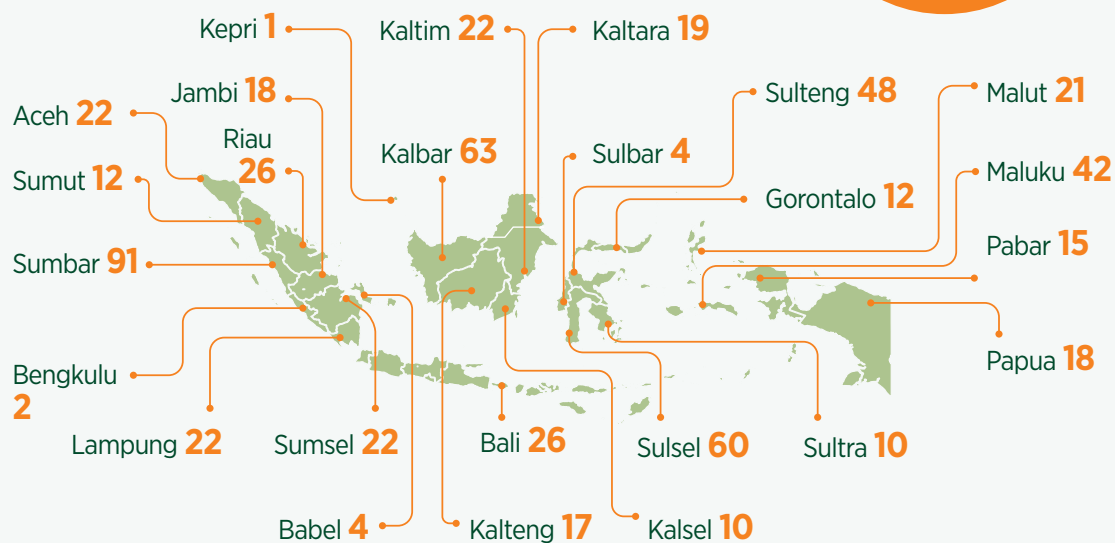
MENUAI RAGAM MANFAAT DARI HUTAN DESA

Terdapat 620 desa di Indonesia yang tergabung dalam Perhutanan Sosial. Melalui skema Hutan Desa, masyarakat di sekitar kawasan hutan itu menuai ragam manfaat.

TOTAL HUTAN

620

Sebaran Hutan Desa di Nusantara (2019)



Hutan di Pedesaan Menuai Ragam Manfaat Ekonomi

Hutan Lindung Bukit Panjang dan Rantau Bayur (Bujang Raba), Kabupaten Bungo, Jambi.

Hasil Kelola

 **6.000 ton simpanan karbon** (2018)

 Pendapatan
Rp 1 miliar (2020)

Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan.

16.500


liter gabah kopi (2019)

Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

3,500

 **liter madu**
(April 2020) ✦  **Rp 350 juta**
(April 2020)

*Simpanan karbon fase pertama program Plan Vivo (2018) dan terjual pada 2020.

Faktor Kunci Percepat Dampak Ekonomi Desa (2018)



Sinergi aktor
kunci
(*penta helix*)



Percepat proses birokrasi pemberian izin kelola

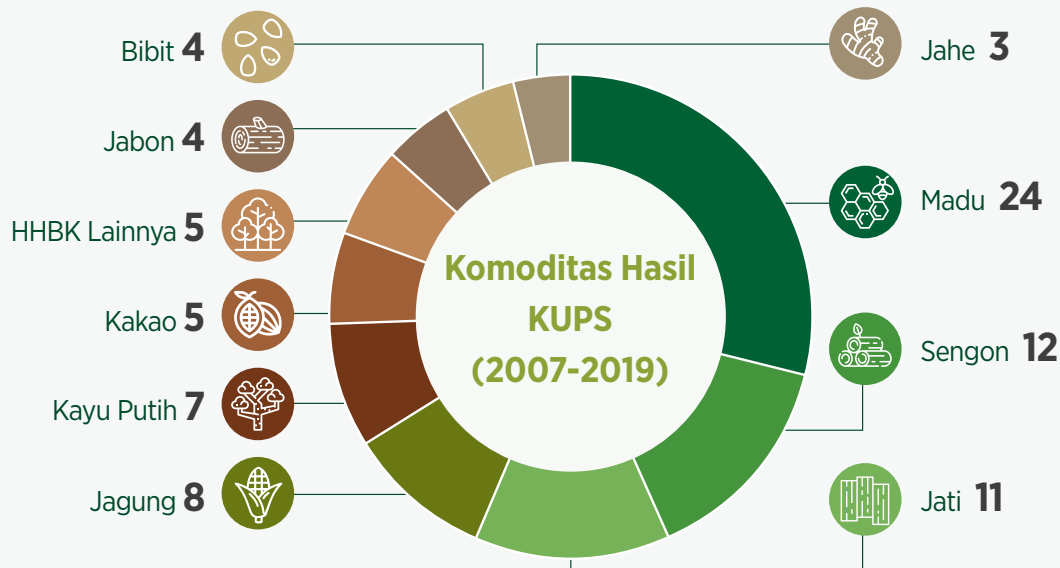


Pemberdayaan masyarakat dan permudah akses produksi

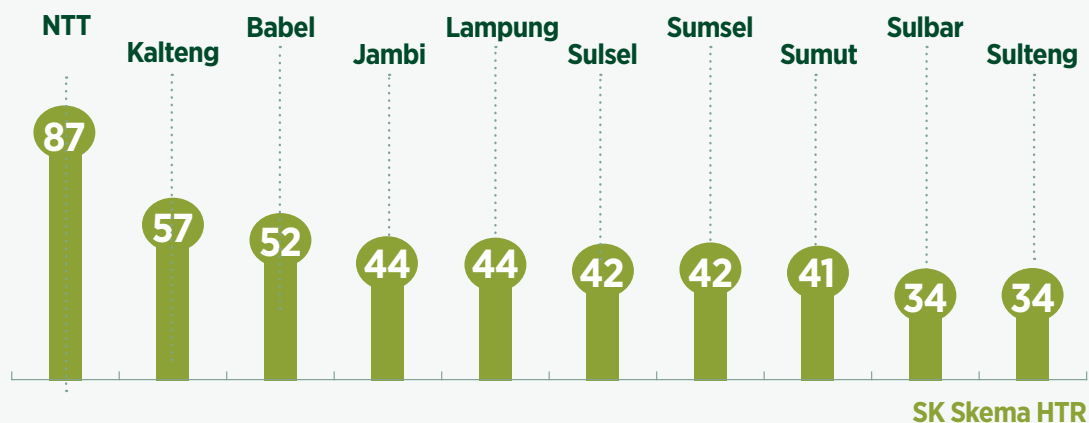
MENGHASILKAN KOMODITAS BERAGAM

Melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) program Perhutanan Sosial, kelompok masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola hutan. 737 kelompok telah mengelolanya jadi ragam komoditas andalan.

Hasil Hutan Andalan Tanaman Rakyat (2007-2019)



10 Provinsi Kantongi Izin Terbanyak (2007-2018)



Aspek Kunci Percepat Pembangunan HTR (2009)



Jaminan aspek pembiayaan.

- Program Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
- Ragam program pembangunan



Penguatan aspek kelembagaan.

- Organisasi petani
- Kelembagaan penunjang (LSM, penyuluh, dan aparat)



Memastikan pengakuan hak atas tanah.



Akses pasar bagi produk yang dihasilkan.



Proses alih teknologi tepat guna kepada masyarakat

Ket:
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

KUPS: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
HHBK: hasil hutan bukan kayu

SUMBER: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) | NASKAH: HANNA FARAH VANIA | DESAIN: BINTANG



MELINDUNGI HUTAN AGAR TETAP LESTARI

Semangat Perhutanan Sosial tidak lepas dari upaya menyelamatkan hutan sekaligus memberikan kehidupan layak dan sejahtera bagi masyarakat sekitar hutan. Pemberian izin membuat masyarakat memiliki komitmen dan mandat untuk melindungi hutan dan isinya. Alhasil, tak hanya membuat kehidupan menjadi lebih baik, hutan pun terjaga. Bahkan, dalam survei KIC, pasca mendapatkan izin perhutanan sosial, tutupan hutan bertambah.

MENYULAP BEKAS TAMBANG JADI EKOWISATA

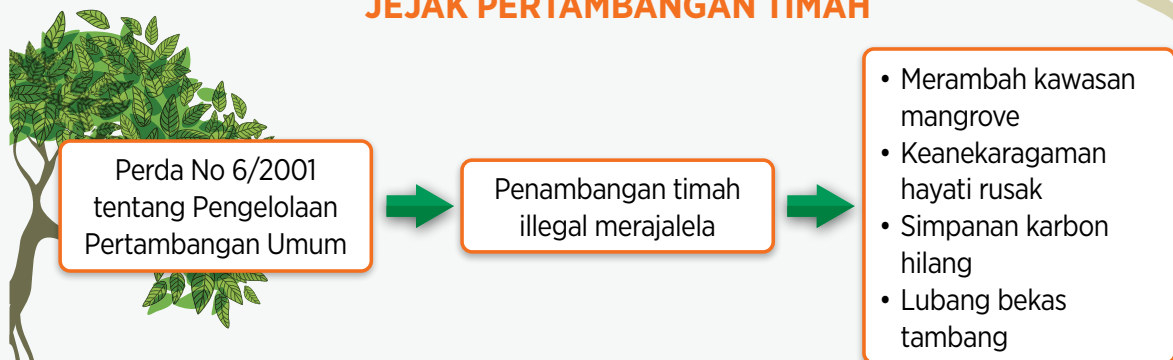
Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung merusak ekosistem alam. Melalui program Perhutanan Sosial, kelompok usaha skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sebrang Bersatu merehabilitasi lahan rusak jadi area wisata.

REHABILITASI 160 HA LAHAN RUSAK

Memilih tanaman yang cepat tumbuh dan sesuai karakteristik lahan bekas tambang

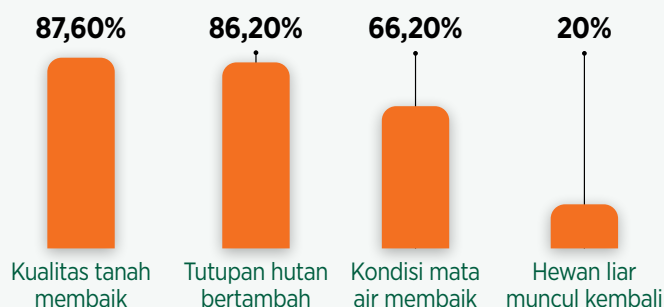
KEBUN BUAH		KAWASAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI
30	Luas (Ha)	130
Sirsak, mangga, lengkeng, jambu mete, dll	Jenis pohon	Beragam tumbuhan mangrove, cemara laut, mahoni, dll
• Usaha teh daun sirsak • Wisata kebun buah	Manfaat	• Area penyimpanan karbon • Habitat hewan dan tumbuhan • Wisata mangrove

JEJAK PERTAMBANGAN TIMAH



PERHUTANAN SOSIAL UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN

Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) pada 2020 terhadap 103 kelompok usaha Perhutanan Sosial menunjukkan program ini bermanfaat bagi perbaikan lingkungan.





MENGATASI KONFLIK TENURIAL BERKEPANJANGAN

Selain memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, salah satu manfaat lain dari Perhutanan Sosial adalah mengurai konflik tenurial yang berkepanjangan dan ketimpangan lahan. Melalui program ini, petani di kawasan hutan mendapatkan jaminan legalitas atau hak akses untuk mengelola lahan di kawasan hutan untuk menanam beragam tanaman yang bernilai ekonomi. Tidak ada lagi konflik atau perebutan lahan dengan pemerintah, BUMN atau korporasi swasta.

MEREDAM KONFLIK DI KAWASAN HUTAN

Skema Kemitraan dalam program Perhutanan Sosial merupakan upaya kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan KPH atau perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan. Sinergi ini juga meredam konflik yang sebelumnya terjadi.

RAGAM PERSOALAN MAMPU TERSELESAIKAN



Lokasi		
DESA REMPEK, Lombok Utara, NTB.	DESA BUNGKU, Batang Hari, Jambi.	HTI WANAMUKTI WISESA, Tebo, Jambi.
Aktor		
KPH Rinjani Barat & penduduk Desa Rempek	PT REKI & penduduk Dusun Kunangan Jaya I	PT Wanamukti Wisesa & KTH Karang Jaya
Strategi		
Membagi konflik yang ada ke dalam 2 bentuk konflik yang berbeda	Pendekatan dialog, mediasi, dan nonlitigasi.	Penawaran program pembinaan petani kecil.
Lama Konflik		
33 tahun	9 tahun	11 tahun
Luas Wilayah		
300 hektare (ha)	153 ha (tiap KTH)	121,7 ha
Solusi		
● Pembagian hasil 25% KPH 75% masyarakat (15% koperasi) ● Perusahaan: bimbingan teknis sampai pemasaran produk.	● Pembagian hasil 15% perusahaan 85% KTH ● Perusahaan: perbaikan infrastruktur hingga pengembangan kapasitas.	● KTH: budidaya tanaman kehutanan penunjang produktivitas perusahaan. ● Perusahaan: pembinaan dan pendampingan.

Ket: KPH: Kesatuan Pengelola Hutan KTH: Kelompok Tani Hutan HTI: Hutan Tanaman Industri

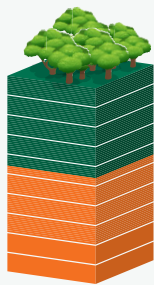


KONTRIBUSI DAERAH DALAM MENJAGA HUTAN

Untuk mewujudkan keberhasilan program Perhutanan Sosial, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Guna mengetahui bagaimana dukungan, peran dan kontribusi pemerintah provinsi dalam mewujudkan program Perhutanan Sosial, Katadata Insight Center (KIC) membuat Indeks Perhutanan Sosial. Melalui Indeks yang diukur berdasarkan berbagai indikator input, proses dan output ini, dapat diketahui pemerintah provinsi yang menjadi contoh penerapan praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan percepatan program Perhutanan Sosial agar rakyat sejahtera dan hutan lestari.

SUMSEL MENGUBAH LABEL PERAMBAH JADI PENGELOLA HUTAN

Hutan Tanaman Rakyat, Unggulan Sumsel

**54**

Nilai indeks tertinggi,
melebihi angka
median nasional (36)

**7**

Kelompok Usaha
sudah memiliki unit
usaha & memasarkan
produknya

Indeks Perhutanan Sosial yang dirumuskan Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, menunjukkan Sumatra Selatan sebagai provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Masyarakat yang tadinya perambah hutan, berubah menjadi pengelola setelah mendapatkan legalitas HTR.

Program Perhutanan Sosial dibahas dalam RPJMD, RKPD, & Perda

HTR, Jaminan Hukum untuk Kelola Hutan

Gapoktan Sialang Makmur di Kec Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir



28 Kelompok
Tani Hutan (KTH)



91% area
ditanami karet



7.150 ha Luas
Perhutanan Sosial



11 KTH sudah bisa
membayar Provisi
Sumber Daya
Hutan (PSDH)

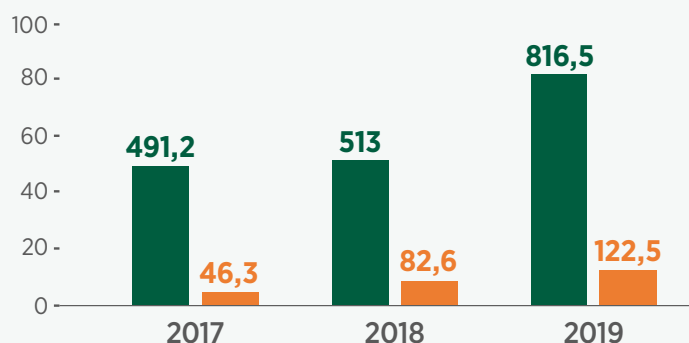


2.533 Keluarga
terlibat

Berkah Ekonomi Bagi Pengelola dan Daerah

Produksi Karet Bertambah, PSDH Meningkat

■ Volume (Ton)
■ PSDH (Rp juta)

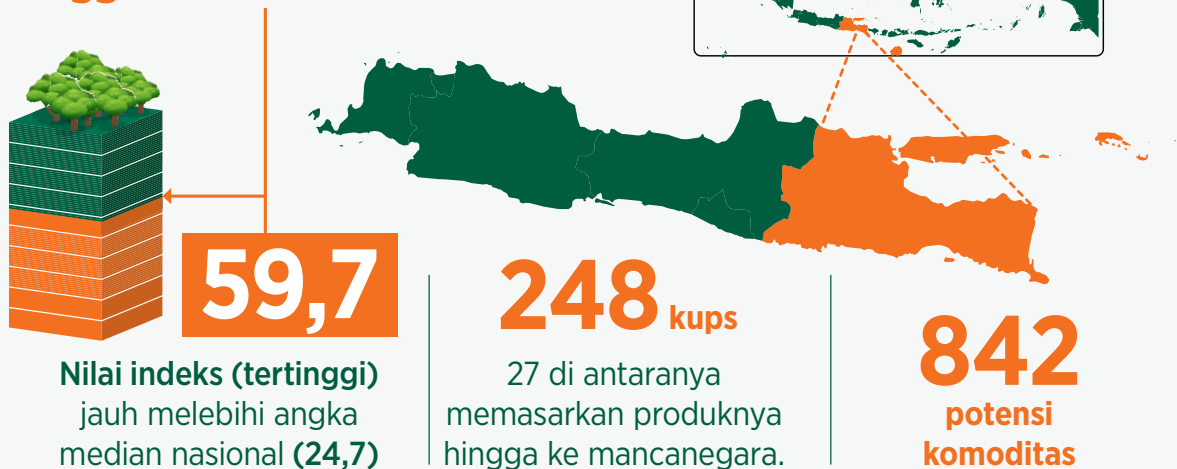


Gapoktan: Gabungan Kelompok Tani
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

JAWA TIMUR SEJAHTERAKAN PETANI LEWAT HUTAN KEMITRAAN

Berdasarkan perhitungan Indeks Perhutanan Sosial yang dirumuskan oleh tim Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Jatim menjadi percontohan provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Kemitraan. Lewat skema ini, Pemda mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan.

Hutan Kemitraan, Unggulan Jatim



Contoh Implementasi Hutan Kemitraan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis di Jember menjadi contoh implementasi izin Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK) pada April 2019.



Sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah lain



Dukungan modal melalui KUR
Rp 17 miliar



Pengembangan usaha kelompok



Komoditas andalan: durian, nangka, petai, alpukat



Wisata alam



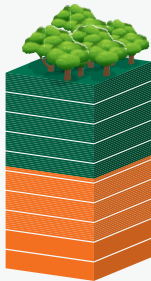
Produksi kopi – dari hulu ke hilir
Rp 60 juta / 3 ton tiap tahun

Realisasi Sk Skema Kemitraan Di Jatim

Skema Hutan Kemitraan	2017	2018	2019
Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)	8	18	226
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	3	13	4

JAMBI MENJAGA AMANAH LEWAT HUTAN ADAT

Hutan Adat, Unggulan Jambi



52,5

Nilai indeks (tertinggi)
di kategori Hutan
Adat, melebihi median
nasional (32,8)



Berdasarkan hasil Indeks Perhutanan Sosial yang dirumuskan oleh tim Katadata Insight Center (KIC), Jambi menjadi percontohan provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Adat.

40%

rasio persetujuan izin
dibandingkan pengajuan
izin (tertinggi)

38

potensi komoditas,
terbanyak
di kategorinya

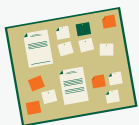
Ragam Upaya Dorong Keberhasilan



Dukungan regulasi melalui
Pergub No. 37/2016



Perda pengakuan Hukum
Adat di tingkat kabupaten



RPJMD memasukkan
program Perhutanan Sosial



Anggaran daerah untuk
implementasi Hutan Adat

RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pranata Adat Jaga Hutan

Desa Adat Rantau Kermas, Jangkat, Merangin, Jambi, Raih Kalpataru 2019

Pranata adat menentukan:

- 1 *Hulu aik*
(wilayah lindung)
- 2 *Tanah ngarai dan padang bebatu*
(wilayah tidak boleh diolah)
- 3 *Tanah ajum*
(wilayah budidaya tanaman)
- 4 *Tanah arah*
(wilayah pemukiman)

Praktik

- 1 Menjaga 1000 pohon di desa
- 2 Pepohonan menjaga aliran
sungai Batang Langkup
- 3 Aliran sungai jadi Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro
- 4 Menerangi rumah warga dan
produksi kopi

KALBAR MEMBANGUN DAERAH MELALUI SKEMA HUTAN DESA

Berdasarkan perhitungan Indeks Perhutanan Sosial dirumuskan oleh tim Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Kalimantan Barat menjadi percontohan provinsi terbaik dalam implementasi skema Hutan Desa. Hingga Oktober 2020, terdapat 116 izin Hutan Desa dengan total luasan 334 ribu hektare.

Hutan Desa, Unggulan Kalbar

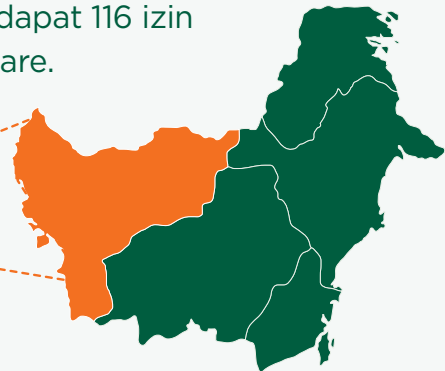


Nilai indeks (tertinggi) di kategori Hutan Desa, jauh melebihi angka median nasional (36)



235

jumlah kelompok usaha (terbanyak) dalam skema Hutan Desa



105

potensi komoditas, terbesar kedua di kategorinya

Ragam Upaya Dorong Keberhasilan



Dukungan regulasi percepatan program Perhutanan Sosial (SK Gubernur No. 525/DLHK/2020)



Meningkatkan jumlah pendampingan pasca izin



Mempercepat proses sertifikasi produk usaha



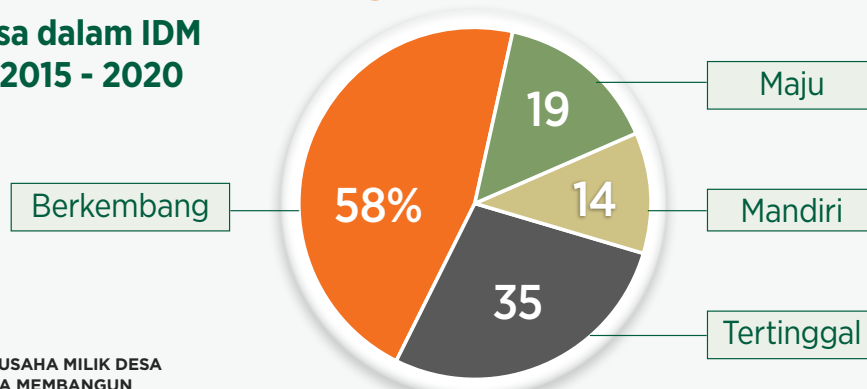
Mendorong bantuan perbankan daerah dan pelaku usaha terkait akses modal



Mengembangkan kerja sama dengan BUMDes

Peran Hutan Sosial Membangun Desa

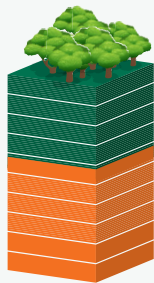
Hutan Desa dalam IDM di Kalbar 2015 - 2020



BUMDes: BADAN USAHA MILIK DESA
IDM: INDEKS DESA MEMBANGUN

KEP. BANGKA BELITUNG MEMBANGUN EKOWISATA BERBASIS HUTAN

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Perhutanan Sosial dirumuskan oleh tim Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Kepulauan Bangka Belitung jadi percontohan provinsi terbaik dalam skema Hutan Kemasyarakatan.



Hutan Kemasyarakatan, Unggulan Babel

54,2

Nilai indeks (tertinggi)
jauh melebihi
angka median nasional
(25,8)

44%

(tertinggi) rasio
izin disetujui
dibandingkan izin
diajukan

15,4%

(tertinggi) rasio luas
Perhutanan Sosial
dibandingkan luas PS
indikatif

Ragam Upaya Dorong Keberhasilan



Dukungan program
tertuang di Perda,
RPJMD dan RKPD



Pendampingan
kelembagaan, kelola
kawasan & kelola usaha



Mengintensifkan
komunikasi kelompok kerja



Meningkatkan kapasitas
penyuluh



Memperluas akses
permodalan

Menjaga & Merehabilitasi Alam

HKm Arsel Community

Ekowisata hutan lindung

Pohon endemik & tanaman obat
untuk daya tarik wisata

Menjaga hewan endemik (Tarsius)

HKm Sebrang Bersatu

Mengubah area bekas tambang timah
jadi mangrove

Menghitung karbon untuk menentukan
jenis pohon yang ditanam

Melibatkan pengunjung menanam
mangrove

Keterangan: RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Perda: Peraturan Daerah

SUMBER: KIC, DINAS KEHUTANAN KEP. BANGKA BELITUNG | PENULIS: FITRIA NURHAYATI | DESAIN: VERY ANGGAR



FORD
FOUNDATION

